

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Penulisan pada bab ini akan membahas teori-teori yang mendukung kerangka pemikiran untuk perumusan hipotesis, yang didukung oleh penelitian sebelumnya. Setelah itu, menjelaskan kerangka teoritis yang memberikan penjelasan tentang model dan bagaimana variabel yang akan diteliti berhubungan satu sama lain, yang menghasilkan hipotesis (dugaan awal penelitian).

2.1.1 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama dengan IPM namun lebih memperhatikan kesenjangan gender. IPG terdiri dari komponen kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak, sama dengan komponen IPM. Perbedaannya, IPM hanya mengukur capaian pembangunan manusia di seluruh wilayah. Namun, IPG dapat menjelaskan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan (Fajriyyah & Budiantara, 2015).

Dalam penilaian IPG, nilai 100 menunjukkan rasio perbandingan tertinggi atau sempurna, sehingga semakin kecil jarak antara nilai IPG dengan 100, semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan, dan semakin besar jarak antara nilai IPG dengan 100, semakin besar perbedaan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dibuat berdasarkan 3 dimensi dasar manusia yaitu, kesehatan dan umur panjang, pendidikan, dan standar hidup yang layak (Aryantari, 2017).

1. Kesehatan dan Umur Panjang. Angka harapan hidup laki-laki dan perempuan yang dapat ditempuh seseorang pada saat lahir adalah indikator yang digunakan dalam dimensi ini. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah alat untuk menilai kinerja pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Menurut UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, "kesehatan" berarti keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Pendidikan. Dua indikator yang digunakan untuk dimensi ini yakni, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pembangunan yang diperoleh seseorang sebanding dengan tingkat pendidikan mereka. Pendidikan, sumber daya manusia, dan kesetaraan gender lainnya adalah indikator suatu negara.
3. Standar Hidup Layak. Pendapatan laki-laki dan perempuan adalah pengukur yang digunakan untuk dimensi ini. Faktor ekonomi, yang berdampak besar pada pembangunan manusia, merupakan komponen penting dari dimensi standar kehidupan layak. Secara ekonomi, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengeluaran per kapita dapat dilihat. Untuk mengukur pembangunan manusia dari segi ekonomi, UNDP menggunakan pengeluaran per kapita.

Perhitungan IPG mengacu pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Batas usia untuk indikator angka harapan lama sekolah adalah 7 tahun ke atas. Ini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur *input* dari dimensi pengetahuan.

Sebaliknya, batas usia rata-rata lama sekolah adalah 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan untuk mengukur *output* dimensi pengetahuan. Karena itu, dalam hal dimensi, sudah mencakup indikator *input* dan *output* (Wisnujati, 2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan ukuran capaian pembangunan yang didasarkan pada sejumlah elemen penting dari kualitas hidup, dapat digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Indeks untuk masing-masing komponen dibuat sebelum menyusun indeks komposit. Penghitungan indeks untuk masing-masing komponen dilakukan dengan cara yang sama seperti metode lama, dengan batasan untuk masing-masing komponen. Setiap komponen memiliki nilai maksimum dan minimum yang ditunjukkan di sini.

Tabel 2.1 Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	17,5	22,5	82,5	87,5
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	25	25
Pengeluaran Per kapita Di sesuaikan	Rupiah	1.007.436		26.572.352	

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2025

Penyusunan indeks untuk indikator dalam dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan dimensi pengeluaran menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dimensi Kesehatan} : i_{\text{Kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

Dimensi Pendidikan :

$$iHLS = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$iRLS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$iPendidikan = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran : $iPengeluaran = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$

Keterangan:

$iKesehatan$: Indeks Kesehatan

$iPengetahuan$: Indeks Pengetahuan

$iHLS$: Indeks Harapan Lama Sekolah

$iRLS$: Indeks Rata-rata Lama Sekolah

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

$iPendapatan$: Indeks Pendapatan

IPG dihitung sebagai rasio antara (Indeks Pembangunan Manusia Perempuan) dengan (Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki), menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L} \times 100$$

Adapun perhitungan IPM perempuan dan IPM laki-laki sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPM_{Laki-Laki} = \sqrt[3]{IKesehatan \times IPendidikan \times IPengeluaran \times 100}$$

$$IPM_{Perempuan} = \sqrt[3]{IKesehatan \times IPendidikan \times IPengeluaran \times 100}$$

Menurut interpretasi angka Indeks Pembangunan Gender (IPG), angka 100 menunjukkan bahwa capaian pembangunan kapabilitas antara laki-laki dan perempuan semakin setara. Sebaliknya, perbedaan dalam pembangunan kemampuan laki-laki dan perempuan semakin besar ketika angka 100 lebih jauh.

2.1.1.1 Teori Indeks Pembangunan Gender

1. Teori Pembangunan Manusia

Teori pembangunan manusia dicetuskan oleh Amartya Sen pada abad ke-20. Teori Pembangunan Manusia adalah pendekatan yang menekankan pentingnya meningkatkan kualitas hidup individu sebagai tujuan utama pembangunan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Teori ini berfokus pada pengembangan potensi manusia dan peningkatan kesejahteraan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam masyarakat (Indarti, 2017). Konsep ini kemudian dipopulerkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) sejak tahun 1990.

Dalam perspektif teori pembangunan manusia, IPG menyoroti pentingnya kesetaraan gender sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, dalam dimensi kesehatan, IPG mempertimbangkan harapan hidup dan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, yang sering kali terhambat oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Di bidang pendidikan, perbedaan dalam tingkat melek huruf dan akses pendidikan antara pria dan wanita

menunjukkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai potensi mereka. Selain itu, dalam aspek pendapatan, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan kesenjangan upah mencerminkan ketidaksetaraan yang lebih luas dalam masyarakat. Dengan demikian, penggunaan IPG dapat membantu pembuat kebijakan merancang program yang lebih responsif terhadap kebutuhan gender, mendorong pemberdayaan perempuan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, sejalan dengan tujuan pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Teori Ekonomi Gender

Marilyn Waring dan Amartya Sen, merupakan tokoh penting yang mengembangkan teori ini. Teori ekonomi gender adalah pendekatan yang menganalisis bagaimana gender mempengaruhi ekonomi dan bagaimana struktur ekonomi dapat memperkuat atau mengurangi ketidaksetaraan gender. Teori ini berfokus pada peran dan kontribusi perempuan dalam ekonomi, serta dampak dari kebijakan ekonomi terhadap perempuan dan laki-laki (Iswahyudi & Asnawi, 2024). Pendekatan ini juga memanfaatkan alat analisis seperti *Gender Analysis Pathway* (GAP) untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat ekonomi. Kesetaraan gender dalam ekonomi bukan hanya merupakan isu keadilan sosial, tetapi juga krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memaksimalkan potensi seluruh populasi tanpa adanya diskriminasi.

3. Teori Feminisme Liberal

Aliran feminisme liberal merupakan aliran yang pertama. Aliran ini muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang biasanya mendukung kebebasan, persamaan, dan otonomi. Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill, dan Helen Taylor adalah pelopor feminisme liberal. Feminisme liberal mengacu pada teori liberalisme untuk menjelaskan hak dan kebebasan perempuan. Gerakan feminis liberal dimulai oleh Mary Wollstonecraft (1759-1799). Mary menulis "*A Vindication of the Rights of Woman*", yang menyatakan bahwa perempuan harus mendapatkan pendidikan seperti halnya laki-laki agar mereka dapat berkembang menjadi individu yang moral dan mandiri (Maulid, 2022).

Teori feminisme liberal menekankan pentingnya kesetaraan gender dan berpendapat bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya menghalangi kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teori ini berfokus pada akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi publik ketika digunakan dalam konteks indeks pembangunan gender (Wibowo, 2022). Meskipun ada kemajuan, kesenjangan gender masih ada, terutama dalam pengelolaan sumber daya, di mana perempuan sering terpinggirkan. Teori ini bertujuan untuk menghilangkan ketidakadilan gender yang disebabkan oleh sistem patriarki. Mereka berharap indeks pembangunan gender dapat mengukur kemajuan menuju kesetaraan dan mendorong perempuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi dan pengambilan keputusan.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, atau yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut Sukirno dalam (Tangke et al., 2019), pengangguran tidak didefinisikan sebagai seseorang yang telah terdaftar dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu tetapi tidak dapat memperoleh posisi yang diinginkan. Sebaliknya, seseorang tidak termasuk dalam kategori pengangguran jika mereka tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan. Menurut Putong dalam (Dianti, 2017), orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia dan jangka waktu yang sama di mana mereka bekerja. Usia kerja biasanya adalah usia di atas usia anak-anak di (atas usia 6 hingga 18 tahun, atau dari usia SD hingga SMA).

Tingkat pengangguran terbuka biasanya digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran di wilayah tertentu. Ini adalah angka yang menunjukkan seberapa besar pengangguran termasuk dalam kategori angkatan kerja tertentu dan tingkat pengangguran total.

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Pengangguran terjadi ketika jumlah penduduk meningkat dengan cepat, yang berarti jumlah pekerja juga meningkat dengan cepat. Dalam ilmu ekonomi, kebebasan tenaga kerja dikatakan bahwa ketidakseimbangan angkatan kerja terjadi ketika lebih banyak orang yang mencari pekerjaan daripada pekerjaan yang tersedia, sehingga terjadi pengangguran.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Pengangguran

Dalam Sejati (2020), untuk membedakan jenis-jenis pengangguran ada dua, pengangguran berdasarkan penyebabnya dan ciri-cirinya.

1. Pengangguran berdasarkan penyebabnya

Pengangguran berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Pengangguran Friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh keputusan seorang pekerja untuk meninggalkan posisinya untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. Pengangguran ini juga sering disebut sebagai pengangguran sukarela.
- b) Pengangguran Siklikal, fluktuasi pengangguran yang disebabkan oleh siklus bisnis disebut pengangguran siklikal. Selama masa resesi, banyak bisnis mengurangi permintaan *input*, termasuk tenaga kerja, karena produksi menurun. Pengangguran siklikal meningkat selama masa resesi dan turun selama masa ekspansi.
- c) Pengangguran Struktural, adalah pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam keterampilan atau lokasi geografis. Tidak semua sektor ekonomi akan terus berkembang, sebagian akan mengalami kemunduran. Beberapa faktor berikut ini menyebabkan penurunan yaitu: barang baru yang lebih baik muncul, kemajuan teknologi mengurangi permintaan produk tersebut, biaya yang sangat tinggi sehingga tidak dapat bersaing, dan ekspor produksi industri menurun drastis karena persaingan yang lebih kuat dari negara lain.

- d) Pengangguran Teknologi, merujuk ketika pekerjaan manusia diganti atau diotomatisasi oleh teknologi, seperti mesin atau perangkat lunak. Fenomena ini terjadi ketika teknologi baru mengubah bagaimana pekerjaan dilakukan, menghasilkan perubahan besar di pasar tenaga kerja. Ketika pekerjaan rutin atau repetitif dapat dilakukan dengan lebih efisien oleh teknologi, sebagian pekerja akan kehilangan pekerjaan mereka. Ini dikenal sebagai pengangguran teknologi.

2. Pengangguran Berdasarkan Cirinya

Berdasarkan cirinya, Pengangguran dibagi menjadi empat kelompok yakni:

- a) Pengangguran Terbuka, penduduk yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi belum atau tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja adalah dikenal sebagai pengangguran terbuka. Pengangguran ini disebabkan oleh penurunan pertumbuhan kesempatan kerja dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja, yang mengakibatkan lebih sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan.
- b) Pengangguran Tersembunyi, pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja dengan baik karena beberapa alasan. Salah satunya adalah karena perusahaan kecil memiliki tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga tidak efisien untuk memulai bisnisnya. Kelebihan tenaga kerja dianggap sebagai pengangguran tersembunyi.
- c) Pengangguran Musiman, orang biasanya bekerja pada waktu tertentu, jadi jika mereka tidak bekerja pada waktu tertentu, mereka akan menganggur.

Jenis pengangguran ini dikenal sebagai pengangguran musiman. Ini terjadi pada orang yang bekerja di bidang pertanian atau nelayan. Ketika memasuki masa panen, petani akan bekerja penuh waktu untuk mendapatkan banyak hasil panen, tetapi jika hasil pertanian tidak maksimal atau terjadi kegagalan pada suatu waktu, mereka akan menganggur.

- d) Setengah Menganggur, adalah individu yang memiliki pekerjaan, tetapi jam kerjanya berbeda dengan pekerja biasa. Orang yang bekerja *part-time* atau *freelance* juga disebut sebagai setengah menganggur karena mereka biasanya bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau hanya bekerja satu sampai dua kali dalam satu minggu sesuai permintaan pemberi kerja.

2.1.2.2 Penyebab Pengangguran

Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian karena mengakibatkan penurunan produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Hal ini terjadi karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Azzahra et al., (2024) menyatakan ada beberapa faktor penyebab pengangguran:

1. Tidak Seimbangnya Jumlah Tenaga Kerja dengan Ketersediaan Lapangan Kerja

Ini adalah penyebab pertama pengangguran. Dengan populasi yang lebih besar, tidak semua orang dapat bergabung dengan lapangan kerja yang tersedia. Hampir tidak ada orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk posisi tersebut akan diserap. Tidak banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan bagi mereka yang tidak dapat bersaing.

2. Teknologi negara semakin maju dan canggih.

Namun, tidak selalu berdampak positif. Karena teknologi berkembang lebih cepat daripada manusia, peran manusia dalam bekerja akan terganti. Kecanggihan teknologi akan meningkatkan tingkat pengangguran jika tidak diantisipasi dengan baik.

3. Keterampilan yang Kurang Memadai

Pencarian pekerjaan akan menjadi sulit bagi mereka yang belum berpengalaman. Penyedia pekerjaan kadang-kadang memerlukan pengalaman kerja, yang membuat mendapatkan pekerjaan sulit bagi mahasiswa baru. Akan sulit bagi mereka yang kurang terampil untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan.

4. Kualifikasi Pendidikan yang Kurang Sesuai

Faktor lain yang menyebabkan pengangguran adalah kualifikasi akademik seseorang yang tidak sesuai dengan permintaan pasar pekerjaan. Banyak pengangguran mengalami masalah latar belakang pendidikan. Masyarakat tidak memiliki akses ke pendidikan, yang menyebabkan mereka kurang kompeten di dunia kerja. Padahal pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter dan kemampuan untuk bekerja.

5. Tidak Meratanya Lapangan Kerja

Konsentrasi pekerjaan lebih dipusatkan di kota membuat sebagian orang kesulitan mengaksesnya. Seseorang mungkin mempertimbangkan untuk mengambil pekerjaan yang ada di kota karena jauhnya tempat tinggal dengan tempat kerja. Meskipun Anda memiliki gaji yang lebih tinggi, namun biaya

transportasi cukup mahal. Namun, ada sedikit pekerjaan di kota atau desa. Angka pengangguran di pedesaan akan berkurang jika lapangan kerja lebih merata atau tidak hanya terkonsentrasi di kota.

2.1.2.3 Akibat Pengangguran

Menurut Samuelson dalam (Rianda, 2020) menyebutkan adanya dampak dari pengangguran, diantaranya:

1. Dampak pengangguran terhadap perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi menyebabkan sulit bagi masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini terbukti oleh akibat negatif dari masalah pengangguran sebagai akibat ekonomi, yaitu:

- a) pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pendapatan nasional yang sebenarnya, atau output yang sebenarnya, lebih rendah dari pendapatan nasional yang potensial, atau output yang potensial. Akibatnya, tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai lebih rendah dari tingkat yang sebenarnya.
- b) Karena tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, sektor pajak akan kehilangan pendapatan nasional karena pajak yang harus dibayar dari masyarakat juga akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan menurun, yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan kegiatan pembangunan.

- c) Sektor swasta dapat mengalami dua konsekuensi negatif dari pengangguran.

Pertama, pengangguran yang disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja karena kurangnya kapasitas mesin. Kedua, pengangguran yang disebabkan oleh kegiatan yang rusak yang dialami oleh suatu perusahaan, yang menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan. Karena, jika keuntungan perusahaan rendah, perusahaan lain tidak akan melakukan investasi.

2. Dampak pengangguran terhadap individual

Pengangguran dapat mempengaruhi kehidupan individu atau kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa dampak sosialnya yaitu:

- a) Pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan dan mata pencaharian.

Di negara-negara berkembang, tidak ada program asuransi pengangguran yang berkembang, tetapi pengangguran di negara-negara maju menerima bantuan keuangan dari badan asuransi pengangguran, yang memungkinkan mereka untuk terus membiayai kehidupan mereka dan keluarga mereka.

- b) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan atau penurunan kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Kemampuan ini hanya dapat dipertahankan apabila kemampuan tersebut dipraktikkan.

Pengangguran juga dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Masyarakat dapat menjadi tidak puas dengan pemerintah yang berkuasa karena tingkat ekonomi yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi.

2.1.2.4 Teori Pengangguran

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang teori-teori pengangguran:

1. Teori Keynes

Teori pengangguran Keynes, dikembangkan oleh ekonom John Maynard Keynes dalam bukunya "*The General Theory of Employment, Interest, and Money*" (1936). Menurut Keynes dalam (Mahroji & Nurkhasanah, 2019), pengangguran muncul sebagai konsekuensi dari permintaan agregat yang tidak mencukupi. Permintaan agregat mencakup total permintaan barang dan jasa dalam kerangka ekonomi. Peningkatan pasokan tenaga kerja akan memicu penurunan upah, dan pengurangan upah ini akan menyebabkan kerugian daripada keuntungan, karena penurunan upah ini mencerminkan daya beli masyarakat mengenai barang tertentu. Daya beli masyarakat, yang berfungsi sebagai salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia yang rendah, akan memaksa perusahaan untuk menurunkan kapasitas produksinya dan membuatnya tidak mampu menyerap kelebihan tenaga kerja, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan yang terus-menerus antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang akibatnya mengakibatkan sering terjadi pengangguran.

2. Teori Struktural

Ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan keterampilan pekerja menyebabkan pengangguran struktural. Keterampilan tertentu dapat kehilangan relevansinya sebagai akibat dari perkembangan teknologi, globalisasi, dan pergeseran industri. Teori ini menekankan betapa pentingnya

pelatihan dan pendidikan ulang untuk menyesuaikan keterampilan pekerja dengan persyaratan pasar (Sari et al., 2024).

Menurut perspektif indeks pembangunan gender, teori pengangguran struktural menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara keterampilan perempuan dan kebutuhan pasar kerja dapat menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Ketika perempuan tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, mereka lebih rentan terhadap pengangguran, yang mengurangi akses mereka terhadap peluang ekonomi dan pendidikan. Dengan demikian, kesenjangan gender menjadi lebih buruk dan lebih sulit untuk mencapai kesetaraan. Untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, kebijakan yang mendukung keterampilan, akses ke sekolah, dan lingkungan kerja yang inklusif bagi perempuan harus diterapkan.

3. Teori Klasik

Teori pengangguran klasik berpendapat bahwa upah yang terlalu tinggi menyebabkan ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja, yang menyebabkan lebih banyak tenaga kerja yang ditawarkan daripada yang dibutuhkan. Menurut pandangan ini, pengangguran dapat diatasi melalui mekanisme pasar bebas, di mana upah dapat diubah untuk menyeimbangkan kembali permintaan dan penawaran tenaga kerja. Para ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus membangun teori pengangguran klasik. Mereka berpendapat bahwa ketidakseimbangan sementara di pasar tenaga kerja dapat diperbaiki melalui mekanisme pasar bebas seperti harga dan fleksibilitas upah.

Dari perspektif indeks pembangunan gender, ini menunjukkan bahwa gaji yang tinggi dapat menghalangi perempuan untuk berpartisipasi di pasar kerja, terutama jika mereka menghadapi stereotip atau diskriminasi gender. Agar perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dalam ekonomi dan meningkatkan indeks pembangunan gender, penting untuk menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan upah dan menghilangkan diskriminasi.

2.1.3 Ketimpangan Pendapatan

Menurut Ramadhan (2024), ketimpangan ekonomi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan antara individu, kelompok, atau wilayah tertentu di suatu negara atau wilayah. Kegagalan ekonomi dapat memengaruhi stabilitas sosial dan politik suatu negara atau wilayah karena dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik dalam masyarakat. Kegagalan ekonomi juga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pembagian sumber daya dan kekayaan yang tidak merata dapat menghambat kemajuan ekonomi dan menyebabkan ketidakadilan sosial.

Menurut Baldwin dalam (Sugiasuti & Pratama, 2022), ketidakseimbangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dapat didefinisikan sebagai perbedaan dalam kemakmuran ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Perbedaan ini tercermin dalam adanya perbedaan pendapatan. Di negara-negara berkembang, dampak balik yang kuat dan dampak sebar yang lemah menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan kerangka konseptual yang meneliti penyebaran pendapatan di antara individu atau rumah tangga dalam

masyarakat tertentu. Ada dua konsep utama yang berkaitan dengan distribusi pendapatan, yaitu ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut mengacu pada pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan menggunakan parameter dengan nilai mutlak. Sebaliknya, ketimpangan relatif membandingkan jumlah pendapatan yang diterima oleh individu atau kelompok anggota masyarakat secara menyeluruh.

Sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara dan sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, distribusi pendapatan adalah salah satu komponen yang sangat penting. Ini biasanya diukur dengan indeks Gini.

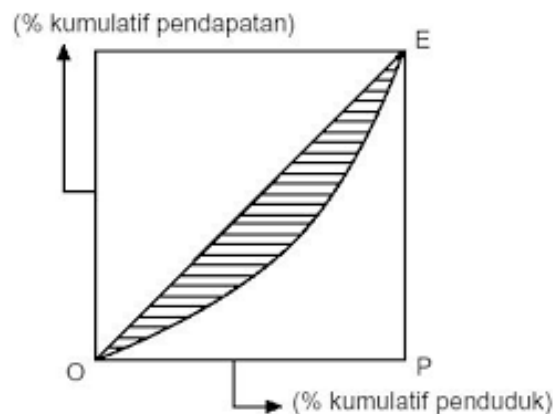
2.1.3.1 Teknik Perhitungan Ketimpangan Pendapatan

Untuk mengukur dan mengetahui tingkat ketimpangan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dapat digunakan beberapa metode diantaranya yaitu:

1. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di seluruh segmen populasi yang berbeda. Kurva ini terletak di dalam persegi, dengan sumbu vertikal menunjukkan persentase kumulatif pendapatan, sedangkan sumbu horizontal menandakan persentase kumulatif populasi (Damayanti, 2020). Kurva itu sendiri diposisikan di sepanjang diagonal utama bujur sangkar. Kurva Lorenz yang mendekati diagonal (menunjukkan bentuk yang lebih lurus) menunjukkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz menyimpang dari diagonal

(menunjukkan kelengkungan yang lebih besar), itu menandakan kondisi yang memburuk, di mana distribusi pendapatan nasional menjadi semakin tidak efisien dan tidak adil.



Sumber: Desfaryani et al., (2020)

Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, Sumbu horizontal menunjukkan persentase penduduk secara keseluruhan, dan sumbu vertikal menunjukkan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase penduduk. Karena setiap titik pada garis diagonal menunjukkan persentase penduduk yang sama dengan persentase pendapatan yang diterima, garis diagonal di tengah disebut sebagai "garis pemerataan sempurna".

2. Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan distribusi pendapatan adalah rasio Gini, yang pertama kali dikembangkan oleh ahli statistik dan ahli sosiologi Italia bernama Corrado Gini. Dia menerbitkannya dalam makalahnya yang berjudul "*Variabilitas and Mutabilitas*" pada tahun 1912 menurut Machmud (2016) dalam (Harlina & Manduapessy, 2023). *Gini ratio*, adalah perbedaan antara pendapatan, kesejahteraan, atau ketidakmerataan secara keseluruhan. Ini karena

gini ratio adalah formula yang menghitung rasio luas bidang yang terletak antara kurva Lorenz dan garis diagonal. Oleh karena itu, *gini ratio* tidak dapat lepas dari kurva Lorenz.

Nilai indeks Gini berkisar antara nol dan satu. Nilai yang mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah, sedangkan nilai yang mendekati satu menunjukkan adanya ketimpangan yang besar. ketika *gini ratio* menurun maka distribusi pengeluaran masyarakat membaik dan sebaliknya.

Salah satu alat yang paling sering digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh adalah *gini ratio*. Rumus *gini ratio* adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$$

Keterangan:

GR : *Gini Ratio*

P_i : Persentase penduduk pada kelas ke-i

Q_i : Persentase kumulatif jumlah pengeluaran dalam kelas ke-i

Q_{i-1} : Persentase kumulatif jumlah pengeluaran dalam kelas ke-(i-1)

K : Banyaknya kelas pengeluaran

Berdasarkan kelasnya, indeks gini terbagi menjadi beberapa kelas di antaranya sebagai berikut :

a) $G < 0,40$: ketimpangan rendah

b) $0,40 \leq G \leq 0,5$: ketimpangan sedang

c) $G > 0,5$: ketimpangan tinggi

3. Menurut Bank Dunia

Menurut BPS (2016), Bank Dunia menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan dapat dihitung dengan membandingkan persentase pendapatan masyarakat dari kelompok berpendapatan rendah dengan pendapatan total penduduk. Ada tiga kategori ketimpangan pendapatan, seperti yang dinyatakan oleh Bank Dunia, yaitu:

- a) Ketimpangan Tinggi : Jika 40 persen penduduk suatu negara berpendapatan terendah memperoleh sekitar kurang 12 persen jumlah pendapatan negara tersebut maka hal ini termasuk ke dalam ketimpangan yang tinggi.
- b) Ketimpangan Sedang : Jika 40 persen dari jumlah penduduk yang berpendapatan terendah, tetapi hanya menerima antara 12-17 persen dari seluruh pendapatan negara. Golongan ini masih dapat dikatakan sebagai keadaan dengan ketimpangan yang sedang.
- c) Ketimpangan Rendah : Jika golongan penduduk yang 40 persen tersebut memperoleh lebih dari 17 persen dari total pendapatan negaranya, maka tingkat ketimpangannya termasuk rendah.

4. Indeks Williamson

Indeks Williamson, yang dibuat oleh Williamson dalam tulisannya tahun 1965, merupakan alat untuk mengukur ketidakmerataan regional, dan ukuran ketimpangan pendapatan lainnya yang lebih penting untuk dipelajari. Metode ini didasarkan pada angka per kapita dan populasi suatu negara (Ragil, 2018). Metode sistematis untuk menghitung Indeks Williamson yaitu:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 \frac{f_i}{n}}}{Y}$$

Keterangan:

IW : Indeks Williamson

Y_i : PDRB per kapita

Y : PDB per kapita

f_i : Jumlah penduduk di kabupaten/kota i

n : Jumlah penduduk di provinsi

Jika angka indeks kesenjangan Williamson semakin mendekati nol, itu menunjukkan bahwa ketimpangan yang lebih kecil. Sebaliknya, jika angka indeks semakin mendekati satu, itu menunjukkan ketimpangan semakin besar. Untuk menentukan kriteria yang akan digunakan untuk menentukan apakah variasi berada pada tingkat kesenjangan rendah, sedang, atau tinggi. Ini adalah kriterianya:

- a) Ketimpangan rendah, jika $IW < 0,35$
- b) Ketimpangan sedang, jika $IW = 0,35 - 0,5$
- c) Ketimpangan tinggi, jika $IW > 0,5$

2.1.3.2 Faktor Penyebab Ketimpangan

Dalam mengidentifikasi delapan penyebab ketidakseimbangan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, Adelman dan Morris dalam (Yuliani, 2015), menyatakan:

1. Tingginya jumlah penduduk, yang akan berdampak pada penurunan pendapatan per kapita.

2. Inflasi, yang terjadi ketika ada peningkatan pendapatan uang tetapi tidak ada peningkatan produksi barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah.
4. Investasi yang sangat besar dalam proyek dengan banyak modal, sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan nilai lebih tinggi daripada persentase pendapatan dari kerja, yang menyebabkan peningkatan pengangguran.
5. Mobilitas sosial masyarakat yang rendah.
6. Pelaksanaan kebijaksanaan-kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis, sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar daripada persentase pendapatan dari kerja.
7. Ketidakstabilan permintaan negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang menyebabkan nilai tukar perdagangan (*term of trade*) merosot bagi negara yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju.
8. Hancurnya sektor kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lainnya.

2.1.3.3 Teori Kuznet

Teori Kuznets diperkenalkan oleh ekonom dan statistikawan Amerika kelahiran Rusia, Simon Kuznets (1901–1985). Teori ini diperkenalkan pada tahun 1955, kuznet berpendapat bahwa pembangunan di suatu negara terdapat batas-batas tertentu yang dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi. Dalam analisisnya,

Kuznets menemukan bahwa hubungan antara tingkat ketimpangan dan tingkat pertumbuhan ekonomi berbentuk U terbalik. Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi mulai meningkat, distribusi pendapatan menjadi lebih tidak merata, tetapi setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Setelah pertumbuhan ekonomi mencapai suatu titik tertentu, ketimpangan pendapatan mulai menurun (Nanga, 2021).

Teori Kuznets pada awalnya tidak secara eksplisit membahas ketimpangan gender, tetapi konsep ini dapat diterapkan dalam konteks IPG. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan gender mungkin meningkat karena perempuan tidak memiliki akses yang sama ke pendidikan dan pekerjaan. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, akses perempuan ke pendidikan dan partisipasi ekonomi dapat meningkat. Menurut prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Kuznets, negara dapat mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif dengan meningkatkan IPG.

2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan akhirnya tidak mampu menjalani hidupnya. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan. Menurut Soerjono Soekanto dalam (Senewe et al., 2021), mendefinisikan kemiskinan sebagai ketika seseorang tidak dapat memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak dapat memanfaatkan tenaga mental dan fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut Amarta dalam (Wulandari & Rachmawati, 2021),

menyatakan bahwa kemiskinan dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk melakukan fungsi tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, kondisi seperti pendapatan yang rendah, akses ke pendidikan yang layak, dan kondisi kesehatan yang buruk adalah semua contoh dari kemiskinan. Kemiskinan dianggap memiliki banyak aspek.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak memenuhi hak-hak dasar mereka untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut termasuk kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakberdayaan seseorang atau suatu golongan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup yang layak, termasuk kebutuhan pangan dan non pangan. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dasarnya dan kurang mampu untuk menjamin keberlangsungan hidup (Suryawati, 2004).

Menurut Nurkse (1953) dalam (Subianto, 2018), ukuran kemiskinan secara sederhana dan umumnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk dalam golongan miskin absolut apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pakaian, makanan, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang atau sekelompok masyarakat termasuk dalam kategori miskin relatif apabila mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, yang menyebabkan ketimpangan pendapatan.

3. Kemiskinan Kultural

Seseorang atau sekelompok masyarakat termasuk dalam kategori miskin kultural apabila sikap mereka atau sikap mereka tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan mereka meskipun ada usaha dari pihak lain untuk memperbaikinya.

2.1.4.1 Indikator Kemiskinan

BPS (2014) menggunakan tiga ukuran kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, yaitu:

1. *Head Count Index*, yaitu menunjukkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
2. *Poverty Gap Index* (Indeks Kedalaman Kemiskinan), yaitu menunjukkan ukuran rata-rata perbedaan antara pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
3. *Poverty Severity Index* (Indeks Keparahan Kemiskinan), yaitu menunjukkan bagaimana pengeluaran tersebar di antara penduduk miskin.

Kuncoro (2006) dalam (Widiyatna & Rahardjo, 2023) menyatakan bahwa menggunakan *Head Count Index* adalah metode yang paling mudah untuk mengukur kemiskinan dari ketiga metode tersebut. Menurut Soleh (2014), menyatakan bahwa definisi yang paling umum digunakan di Indonesia, terutama dalam pengukuran kemiskinan secara nasional, adalah definisi yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut pendekatan yang digunakan oleh BPS, yaitu pendekatan dasar (*basic needs approach*), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, baik kebutuhan dasar makanan (2.100 kalori per kapita per hari) maupun kebutuhan dasar bukan makanan. Beberapa kelompok dan ahli sebelumnya telah mencoba menciptakan gagasan tentang kebutuhan dasar ini, serta metode untuk mengukurnya. Konsep kebutuhan dasar mencakup komponen kebutuhan dasar, sifat-sifatnya, dan hubungannya dengan garis kemiskinan.

2.1.4.2 Penyebab Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan pasti berbeda di antara daerah. Ekonomi, sosial, dan faktor struktural (politik) adalah beberapa penyebab kemiskinan. Negara yang sedang berkembang juga mengalami kemiskinan, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang membuat kemajuan negara sedang berkembang sulit.

Sharp (1996) dalam (Mustika, 2013), mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

1. Secara mikro, kemiskinan disebabkan oleh ketidaksamaan dalam pola kepemilikan sumber daya, yang mengakibatkan distribusi pendapatan yang tidak adil.

2. Perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia menyebabkan kemiskinan. Produktivitas yang rendah menyebabkan upah yang diterima rendah. Faktor keturunan, ketidakberuntungan, pendidikan yang rendah, dan diskriminasi dapat menjadi penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia ini.
3. Perbedaan dalam akses modal menyebabkan kemiskinan.

2.1.4.3 Teori Kemiskinan

Menurut Sukirno (2006) dalam (Susanto & Pangesti, 2019), mengemukakan teori-teori kemiskinan yaitu:

1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Teori lingkaran setan kemiskinan pertama kali dikemukakan oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953. Nurkse menjelaskan bahwa kemiskinan menghasilkan siklus yang sulit diputuskan. Pendidikan yang buruk dan kesehatan yang buruk menyebabkan produktivitas yang rendah, yang pada gilirannya menyebabkan pendapatan yang rendah. Akibatnya, orang menjadi lingkaran setan di mana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang menghambat pembangunan manusia.

Dari sudut pandang Indeks Pembangunan Gender (IPG), siklus ini berdampak negatif karena perempuan sering menghadapi hambatan yang lebih besar untuk mendapatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, sehingga nilai IPG yang mengukur kesetaraan dalam bidang tersebut cenderung rendah. Dengan kata lain, kemiskinan yang bertahan lama dan mengakar dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dan menghambat peningkatan kualitas

hidup perempuan. Jika perempuan tidak melakukan sesuatu untuk mengatasi kemiskinan ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Oleh karena itu, nilai IPG yang rendah menunjukkan bahwa kemiskinan dan ketidaksetaraan gender saling memperkuat satu sama lain, seperti yang ditunjukkan oleh teori lingkaran setan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya untuk memecahkan lingkaran setan kemiskinan harus mencakup peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan agar IPG meningkat dan pembangunan menjadi lebih inklusif.

2. Teori Neo Liberal

Tokoh seperti Friedrich Hayek dan Milton Friedman merupakan pendorong teori neoliberal, yang mencakup gagasan tentang pasar bebas dan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi. Teori ini mulai populer pada akhir abad ke-20 dan sering dikaitkan dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara Barat. Teori kemiskinan neo-liberal memandang kemiskinan sebagai masalah yang disebabkan oleh kelemahan atau keputusan individu. Metode ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan mekanisme pasar bebas secara alami akan mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial, dengan negara hanya berperan sebagai pengawas dan intervensi jika diperlukan. Ketika kekuatan pasar tumbuh sebesar-besarnya dan adanya pacuan setinggi-tingginya terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan akan hilang dengan sendirinya. Mengatasi kemiskinan secara langsung dapat dilakukan melalui keluarga, kelompok swadaya, atau lembaga keamanan. Dan karena negara berfungsi sebagai penjaga, negara dapat ikut campur ketika

lembaga tersebut tidak mampu lagi melakukan tugasnya (Susanto & Pangesti, 2019).

Dalam konteks Indeks Pembangunan Gender (IPG), metode ini dapat memiliki efek baik dan buruk. Dengan mengurangi regulasi, perempuan dapat memperoleh peluang ekonomi yang lebih besar dan berpartisipasi lebih aktif dalam pasar tenaga kerja. Namun, dengan cara ini, ketidaksetaraan gender dapat diperburuk, terutama jika perempuan dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah tidak mendapatkan akses yang sama ke peluang yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengurangan anggaran pemerintah untuk program sosial dapat menghambat akses perempuan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang penting. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan menguntungkan semua orang, termasuk perempuan, sangat penting untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan ekonomi.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, *Gini Ratio*, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Gender pada Provinsi di Pulau Maluku & Papua Tahun 2014-2023”. Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan penelitian ini.

Tabel 2.2 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Afrilia Nur Aini (2021) “Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019”	Variabel independen: Kemiskinan Variabel dependen: IPG	Variabel independen: Tingkat Pengangguran Terbuka dan <i>Gini Ratio</i>	Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif tidak signifikan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan, dan kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap IPG.	<i>Jurnal Kebijakan Pembangunan</i> , 16(1), 77–91. https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.147
2	Siska Agus Setiani, Sri Endang Saleh, dan Bobby Rantow Payu (2024) “Analisis Indeks Pembangunan Gender Di Kawasan Teluk Tomini dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya”	Variabel independen: Kemiskinan Variabel dependen: IPG	Variabel independen: Tingkat Pengangguran Terbuka dan <i>Gini Ratio</i>	TPAK dan pengeluaran per kapita Perempuan berpengaruh positif signifikan sedangkan kemiskinan negatif tidak signifikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPG.	<i>Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan</i> , 1(3), 127–137. https://doi.org/10.37905/jsep.v1i3.23842
3	Reza Umamah dan Freesca Syafitri (2025) “Analisis Pengaruh Pengangguran, Gini Rasio, dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung”	Variabel independen: Pengangguran dan <i>Gini Ratio</i>	Variabel independen: Kemiskinan Variabel dependen: IPG	Tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Demikian pula, Gini rasio menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, jumlah penduduk memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung.	<i>Jurnal Of Development Economic And Digitalization</i> , 4(5), 122–134.
4	Khusnul Fadillah, Lutfiah Farah Azura, dan Dian Octaviani (2025) “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kawasan Timur Indonesia Periode 2015-2023”	Variabel independen: Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan	Variabel independen: <i>Gini Ratio</i> Variabel dependen: IPG	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi dan Angkatan Kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM sedangkan Tingkat Kemiskinan berpengaruh signifikan dan negatif. Konsumsi Listrik dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM.	<i>Jurnal Ekonomi Trisakti</i> , 5(1), 89–100. https://doi.org/10.25105/v5i1.21772

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Jahtu Widya Ningrum, Aziza Hanifa Khairunnisa, dan Nurul Huda (2020) “Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam”	Variabel independen: Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	Variabel independen: <i>Gini Ratio</i> Variabel dependen: IPG	Kemiskinan dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM tahun. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM	<i>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam</i> , 6(2), 212. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034
6	Abddurrahmat Hasyim, Didit Welly Udjianto, dan Sri Rahayu Budi Hastuti (2022) “Analisis Indeks Pembangunan Manusia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020”	Variabel independen: <i>Gini Ratio</i>	Variabel independen: Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Variabel dependen: IPG	Variabel Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap IPM, variabel <i>Gini ratio</i> berpengaruh negatif terhadap IPM, dan variabel PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2020.	<i>Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia</i> , 4(2), 146. https://doi.org/10.17509/jpei.v4i2.53089
7	Muhammad Raffi (2025) “Analisis Rata-Rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Surabaya”	Variabel independen: Tingkat Pengangguran	Variabel independen: <i>Gini Ratio</i> dan Kemiskinan Variabel dependen: IPG	Rata-rata lama sekolah dan Tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM.	<i>Jurnal Ekonomi Dan Bisnis</i> , 17(1), 135–139. https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.407
8	Surhaliza Aprilianti dan Yaya Setiadi (2022) “Faktor-faktor Yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2020”	Variabel independen: TPT Variabel dependen: IPG	Variabel independen: Kemiskinan dan Gini ratio	TPT perempuan dan rasio jenis kelamin berpengaruh signifikan, sedangkan APS 16-18 tahun perempuan dan persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPG Indonesia tahun 2020.	<i>Seminar Nasional Official Statistics</i> , 2022(1), 245–254. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1351

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Niswa Nilhaya M. dan Bobi Frans Kuddi (2021) “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Menggunakan Regresi Data Panel”	Variabel independen: <i>Gini Ratio</i> dan Kemiskinan	Variabel independen: Tingkat Pengangguran Terbuka Variabel dependen: IPG	Variabel PDRB dan Tingkat Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan variabel <i>Gini Ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap IPM.	<i>Cenderawasih : Journal of Statistics and Data Science</i> , 83–94.
10	Sri Kasnelly dan Jannatin Wardiah (2021) “Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia”	Variabel independen: Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan	Variabel independen: <i>Gini Ratio</i> Variabel dependen: IPG	Pengangguran tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel kemiskinan berdampak negatif terhadap IPM.	<i>Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah</i> , 4(II), 590–597. https://doi.org/10.54459/almizan.v4iII.309
11	Muhammad Arif Fahrudin Alfana, Desta Fauzan A, Warastri Laksmiasri, dan Ayu Rahmaningtias (2017) “Dinamika Pembangunan Manusia Berbasis Gender Di Indonesia”	Variabel dependen: IPG	Variabel independen: Tingkat Pengangguran Terbuka, <i>Gini Ratio</i> , dan Kemiskinan analisis deskriptif dan analisis komparasi	Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia berbasis gender di Indonesia meningkat pada 1996–2010, meski sempat menurun pada 1999 akibat krisis ekonomi, didukung oleh peningkatan harapan hidup, pendidikan, dan keterwakilan perempuan di parlemen.	<i>Jurnal Seminar Nasional Geografi</i>
12	Dewi Azizah Meydiasari dan Prof.Dr.H Ady Soejoto (2017) “Analisis pengaruh distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM di Indonesia”	Variabel independen: <i>Gini Ratio</i> dan Tingkat Pengangguran	Variabel independen: Kemiskinan Variabel dependen: IPG	Variabel distribusi pendapatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM. Sedangkan variabel tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.	<i>Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen Dan Keuangan</i> , 01(02), 116–126

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Reka Ramadhan (2024) “Pengaruh Tingkat Ketimpangan (<i>Gini Ratio</i>) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2022”	Variabel independen: <i>Gini Ratio</i>	Variabel independen: Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Variabel dependen: IPG	Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat ketimpangan secara keseluruhan (yang diukur dengan Rasio Gini).	<i>Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science</i> , 3(01), 108–118. https://doi.org/10.58812/jbmws.v3i01.1020
14	Cagar Channani, Marseto, dan Sishadiyati (2024) “Analisis Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah”	Variabel independen: Pengangguran	Variabel independen: <i>Gini Ratio</i> dan Kemiskinan Variabel dependen: IPG	Pertumbuhan ekonomi serta pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.	<i>Jurnal Syntax Admiration</i> , 5(6), 1995–2004. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i6.1171
15	Debesh Bhowmik (2020) “ <i>Impact of Gender Development Index on Human Development Index and Gross Domestic Product Per Capita</i> ”	Variabel dependen: Indeks Pembangunan Gender	Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, dan <i>Gini Ratio</i>	IPG berpengaruh signifikan terhadap IPM dan PDB per kapita selama tahun 1990-2015. Dari persamaan sistem VECM diverifikasi bahwa terdapat kausalitas jangka panjang dari IPM dan PDB per kapita ke IPG.	<i>Vidyasagar University Journal of Commerce</i> , 25, 41–56

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang mengungkapkan dan menentukan persepsi serta hubungan antara variabel yang akan diteliti dengan teori yang telah dipaparkan pada tinjauan pustaka. Mengacu terhadap teori yang ada, secara garis besar penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antara tingkat

pengangguran terbuka, *gini ratio*, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan gender pada provinsi di Pulau Maluku dan Papua tahun 2014-2023.

2.2.1 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Indeks Pembangunan Gender

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tinggi dapat berdampak negatif pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) melalui berbagai mekanisme, seperti akses perempuan ke pendidikan dan pekerjaan. Namun, hasilnya dapat berbeda tergantung pada konteks dan lokasi. Menurut teori struktural dalam (Sari et al., 2024), ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan keterampilan pekerja menyebabkan pengangguran struktural. Ketika tingkat pengangguran meningkat, akses perempuan terhadap peluang kerja dan pendidikan sering kali terhambat, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi dan masyarakat.

Hubungan negatif ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ningrum et al. (2020) di mana Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah IPM di wilayah tersebut. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan per kapita dan menghambat akses pendidikan dan kesehatan bagi penganggur. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Meydiasari & Soejoto (2017), di mana variabel tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

2.2.2 Hubungan *Gini Ratio* dengan Indeks Pembangunan Gender

Indeks pembangunan gender dapat dipengaruhi oleh gini rasio. Ini berarti bahwa tingkat kesetaraan gender berkorelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan, yang ditunjukkan oleh Rasio Gini yang lebih tinggi dan IPG yang lebih rendah. Artinya, semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin rendah tingkat kesetaraan gender. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, yang pada gilirannya menurunkan IPG. Sebaliknya, peningkatan kesetaraan gender dapat berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga menurunkan Rasio Gini.

Hubungan negatif ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umamah & Syafitri (2025), menunjukkan hasil penelitian yaitu gini rasio menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap IPM, artinya jika ketimpangan pendapatan meningkat maka akan menurunkan indeks pembangunan manusia. Karena IPG adalah turunan dari IPM yang berfokus pada kesetaraan gender, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan dapat memengaruhi kesetaraan gender. Ini sama dengan penelitian Hasyim et al. (2022), di mana *gini ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM.

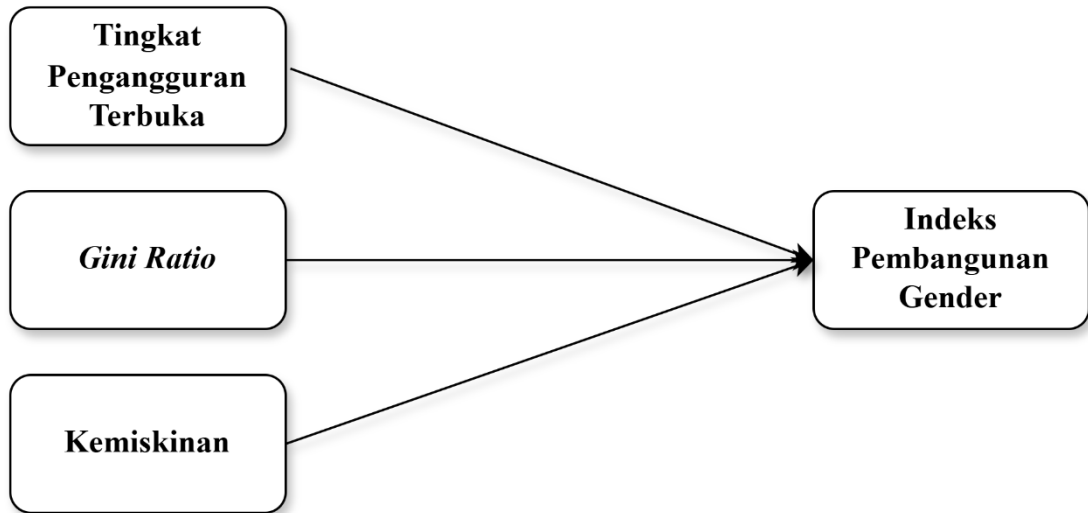
2.2.3 Hubungan Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Gender

Tingkat kemiskinan dapat berdampak pada indeks pembangunan gender, tingkat kemiskinan yang tinggi sering kali berdampak negatif terhadap pembangunan manusia dan kesetaraan gender. Menurut teori lingkaran setan dalam (Nugroho, 2022) menjelaskan bahwa kemiskinan menghasilkan siklus yang sulit

diputuskan. Pendidikan yang buruk dan kesehatan yang buruk menyebabkan produktivitas yang rendah, yang pada gilirannya menyebabkan pendapatan yang rendah sehingga dapat menghambat pembangunan manusia.

Hubungan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah et al. (2025), menunjukkan hasil penelitian yaitu tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM di kawasan timur Indonesia periode 2015-2023. Tingkat kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan menurunnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan, ekonomi, kesehatan yang membuat kemampuan rendah yang dimilikinya, sehingga kualitas dalam bekerja tidak maksimal. Penelitian ini sama dengan Kasnelly & Wardiah (2021), di mana kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu bahwa tingkat pengangguran terbuka, *gini ratio*, dan kemiskinan akan diuji pengaruhnya terhadap indeks pembangunan gender di Pulau Maluku dan Papua tahun 2014-2023. Secara sistematis, kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kajian pustaka, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial variabel tingkat pengangguran terbuka, *gini ratio*, dan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan gender pada provinsi di Pulau Maluku dan Papua tahun 2014-2023.
2. Diduga secara bersama-sama variabel tingkat pengangguran terbuka, *gini ratio*, dan kemiskinan berpengaruh terhadap indeks pembangunan gender pada provinsi di Pulau Maluku dan Papua tahun 2014-2023.